

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

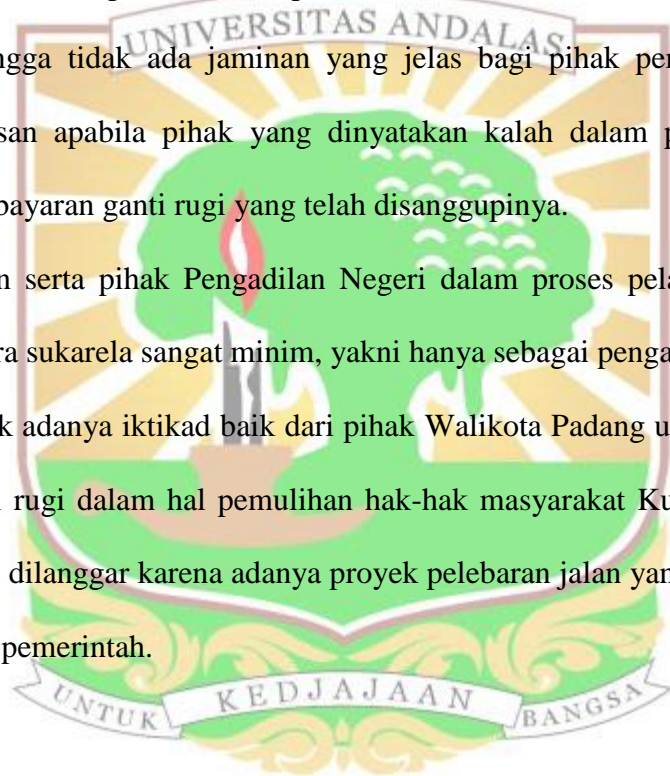
#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh masyarakat Kurao Pagang tersebut berawal dari ketidaksempurnaan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal ini Walikota Padang yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia Manunggal Sakato Badunsanak, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kurao Pagang baik secara moriil maupun materiil.
2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 ini didasarkan pada yurisprudensi, aturan-aturan dalam hukum acara perdata, serta memperhatikan peraturan Mahkamah Agung yang berlaku pada saat itu, namun dalam pertimbangan hukum tersebut tidak dibunyikan secara rinci pasal-pasal yang menjadi dasar diberikannya suatu pertimbangan hukum.
3. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas

Tanah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dilaksanakan secara sukarela atau damai, meskipun telah memakan waktu lebih dari 2 tahun hingga pihak Walikota Padang melakukan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat Kurao Pagang. Adapun kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tersebut, antara lain :

- a. Pengaturan pelaksanaan putusan secara sukarela sangatlah minim, sehingga tidak ada jaminan yang jelas bagi pihak pemohon pelaksana putusan apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan menunda pembayaran ganti rugi yang telah disanggupinya.
- b. Peran serta pihak Pengadilan Negeri dalam proses pelaksanaan putusan secara sukarela sangat minim, yakni hanya sebagai pengawas pasif.
- c. Tidak adanya iktikad baik dari pihak Walikota Padang untuk memberikan ganti rugi dalam hal pemulihan hak-hak masyarakat Kurao Pagang yang telah dilanggar karena adanya proyek pelebaran jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

- a. Seharusnya diberikan sanksi tegas kepada tiap-tiap oknum pemerintah yang dengan sengaja atas kekuasaannya melakukan atau tidak melakukan

suatu prosedur dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan umum yang dapat merugikan masyarakat. Saat ini semakin banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan aturan. Meskipun telah adanya jalan melalui gugatan untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat, namun apabila sedari awal sebuah aturan dijalankan sebagaimana mestinya, maka masyarakat tidak harus merasakan penderitaan akibat tindakan tidak bertanggung jawab tersebut.

- b. Sebaiknya dilakukan pembedaan antara pelaksanaan putusan secara sukarela, pelaksanaan putusan secara damai, dan pelaksanaan putusan secara paksa dengan bantuan hukum. Karena pada pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2010 ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Walikota Padang, karena adanya paksaan dari pihak masyarakat melalui permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta penundaan yang lama dalam penyerahan uang ganti ruginya kepada pihak masyarakat. Namun karena tidak dilaksanakan dengan paksaan seperti yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu eksekusi, maka pelaksanaan putusan ini dimasukkan sebagai pelaksanaan putusan secara sukarela, meskipun dilakukan tidak dengan sukarela oleh pihak Walikota Padang.

- c. Sebaiknya pihak Pengadilan Negeri berperan lebih aktif dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, sehingga tidak akan terjadi penundaan yang memakan waktu lama seperti yang terjadi dalam kasus ini.

